



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan dinamisnya penyelenggaraan Pemerintahan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

**dan
BUPATI SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.284.764.456.645,00 bertambah sejumlah Rp.16.817.277.310,96 sehingga menjadi Rp.1.301.581.733.955,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula		Rp.	1.254.764.456.645,00
2. Bertambah		Rp.	11.955.772.535,29
Jumlah Pendapatan	Setelah	Rp.	1.266.720.229.180,29
Perubahan			

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	1.281.764.456.645,00
2. Bertambah	Rp.	16.817.277.310,96
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.298.581.733.955,96
Defisit setelah perubahan	Rp.	(31.861.504.775,67)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	4.861.504.775,67
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	34.861.504.775,67
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	31.861.504.775,67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	71.716.021.645,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	5.733.226.064,29
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	77.449.247.709,29
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.	998.778.862.000,00
2. Bertambah	Rp.	646.029.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	999.424.891.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	184.269.573.000,00
2. Bertambah	Rp.	5.576.517.471,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	189.846.090.471,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	18.718.108.103,00
2. Bertambah	Rp.	517.798.273,00
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	19.235.906.376,00

b. Hasil Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	9.343.046.435,00
2. Bertambah	Rp.	958.724,40
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	9.344.005.159,40

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	6.044.383.899,00
2. Berkurang	Rp.	881.508.053,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	6.925.891.952,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	37.610.483.208,00
2. Bertambah	Rp.	4.332.961.013,89
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	41.943.444.221,89

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	13.330.821.000,00
2. Bertambah	Rp.	646.029.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	13.976.850.000,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)		
1. Semula	Rp.	728.558.349.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp.	728.558.349.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)		
1. Semula	Rp.	256.889.692.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp.	256.889.692.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	53.922.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	53.922.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	45.535.567.000,00
2. Bertambah	Rp.	5.576.517.471,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	51.112.084.471,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	84.812.006.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	84.812.006.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	792.661.729.385,00
2. Berkurang	Rp.	(3.010.866.372,04)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	789.650.863.012,96
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	489.102.727.260,00
2. Bertambah	Rp.	19.828.143.683,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	508.930.870.943,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	622.693.675.481,68
2. Berkurang	Rp.	(755.840.234,14)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	621.937.835.247,54
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	14.247.400.000,00
2. Berkurang	Rp.	(850.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	13.397.400.000,00
c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	3.646.640.705,00
2. Bertambah	Rp.	51.875.700,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	3.698.516.405,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1. Semula	Rp.	149.574.013.198,32
2. Bertambah	Rp.	43.098.162,10
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	149.617.111.360,42
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	(1.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	39.801.606.526,00
2. Berkurang	Rp.	(635.256.280,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	39.166.350.246,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	234.865.966.215,00
2. Bertambah	Rp.	29.900.120.581,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	264.766.086.796,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	214.435.154.519,00
2. Berkurang	Rp.	(9.436.720.618,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	204.998.433.901,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	4.861.504.775,67
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	34.861.504.775,67
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya | | |
| 1. Semula | Rp. | 30.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 4.861.504.775,67 |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 34.861.504.775,67 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2019
BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :
(9/94/2019).

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.254.764.456.645,00	1.266.720.229.180,29	11.955.772.535,29	0,95
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.716.021.846,00	77.449.247.709,29	5.733.226.064,29	7,99
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	18.718.109.103,00	19.235.908.378,00	517.798.273,00	2,77
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9.343.048.435,00	9.344.006.159,40	958.724,40	0,01
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.044.383.859,00	6.625.861.952,00	581.508.093,00	14,58
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.610.483.208,00	41.943.446.221,89	4.332.961.013,89	11,52
4.2.	DANA PERIMBANGAN	958.778.862.000,00	959.424.891.000,00	646.029.000,00	0,06
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	13.330.821.000,00	13.976.850.000,00	646.029.000,00	4,85
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	728.558.349.000,00	728.558.349.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	258.889.692.000,00	258.889.692.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	184.289.573.000,00	189.846.090.471,00	5.576.517.471,00	3,03
4.3.1.	Pendapatan Hibah	53.922.000.000,00	53.922.000.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.536.557.000,00	51.112.084.471,00	5.576.517.471,00	12,25
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	84.812.006.000,00	84.812.006.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.264.764.456.645,00	1.266.720.229.180,29	11.955.772.535,29	0,95
5.	BELANJA DAERAH	1.281.764.456.645,00	1.286.581.733.955,96	4.817.277.310,96	1,31
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	792.661.729.355,00	789.650.863.012,96	(3.010.866.372,04)	(0,38)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	622.603.675.481,88	621.937.635.247,54	(755.840.234,14)	(0,12)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	14.247.400.000,00	13.357.400.000,00	(890.000.000,00)	(5,97)
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.648.640.705,00	3.698.516.405,00	51.875.700,00	1,42
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	149.574.013.198,32	149.617.111.360,42	43.098.162,10	0,03
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(60,00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	489.102.727.290,00	506.930.870.943,00	17.828.143.653,00	4,05
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.801.606.526,00	39.166.350.246,00	(635.256.280,00)	(1,60)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	234.865.968.215,00	264.786.086.796,00	29.920.120.581,00	12,73
5.2.3.	BELANJA MODAL	214.435.154.515,00	204.995.433.901,00	(9.439.720.614,00)	(4,40)
	JUMLAH BELANJA	1.281.764.456.645,00	1.286.581.733.955,96	4.817.277.310,96	1,31
	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.000.000.000,00)	(31.861.504.775,67)	(4.861.504.775,67)	(18,01)
6.	PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	31.861.504.775,67	4.861.504.775,67	18,01
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	34.861.504.775,67	4.861.504.775,67	16,21
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000,00	34.861.504.775,67	4.861.504.775,67	16,21
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	34.861.504.775,67	4.861.504.775,67	16,21
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	27.000.000.000,00	31.861.504.775,67	4.861.504.775,67	18,01
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.00.03.11.	KECAMATAN JUNJUNG SIRIH	10.500.000,00	10.500.000,00			442.015.000,00	431.784.852,00	873.784.852,00	442.015.000,00	431.784.852,00	873.784.852,00		
4.00.03.12.	KECAMATAN HILIRAN CIJAMANTI	7.500.000,00	7.500.000,00			413.925.000,00	390.280.000,00	804.205.000,00	413.925.000,00	390.280.000,00	804.205.000,00		
4.00.03.13.	KECAMATAN TIGO LURAH	6.000.000,00	6.000.000,00			474.210.000,00	479.570.882,00	953.780.882,00	474.210.000,00	479.570.882,00	953.780.882,00		
4.00.03.14.	KECAMATAN DANAU KEMBAR	5.000.000,00	5.000.000,00			387.050.000,00	386.850.675,00	793.902.675,00	376.550.000,00	386.850.675,00	773.402.675,00	(20.550.000.000.000.02.54)	
4.00.04.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					1.172.163.062,00		1.172.163.062,00	1.112.865.000,00		1.112.000.000,00	160.000.000,00	(5.13)
4.00.04.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.172.163.062,00	1.587.958.383,00	2.759.120.415,00	1.112.000.000,00	6.691.965.353,00	7.804.001.353,00	4.942.001.000,00	72,90
	JUNLAH	1.254.764.400.000,00	1.256.720.220.180,29	2.501.454.895.629,29	0,00	702.051.725.205,00	670.514.034.000,00	1.362.570.533.478,00	700.050.883.612,94	508.000.870.940,00	1.208.051.733.555,94	1.364.504.759.522.04	21.04

Kode	Uraian	Pembayaran				SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembayaran		
1	2	3	4	5	6	
3.00.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	34.861.504.775,67	3.000.000.000,00	31.861.504.775,67	-	-
3.00.03.	KELUANGAN	34.861.504.775,67	3.000.000.000,00	31.861.504.775,67	-	-
3.00.03.00.	PPKD	34.861.504.775,67	3.000.000.000,00	31.861.504.775,67	-	-

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

1	2	3	4	5-4-3	6	7	8	9-7-10	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.00.03.11.	KECAMATAN JUNJUNG SIRIH	10.000.000,00	10.500.000,00			442.075.000,00	431.769.652,00	573.784.652,00	442.075.000,00	431.769.652,00	873.761.352,00		
4.00.03.12.	KECAMATAN HILIRAN GUMANTI	7.500.000,00	7.500.000,00			413.520.000,00	390.310.000,00	604.205.000,00	413.520.000,00	390.250.000,00	804.205.000,00		
4.00.03.13.	KECAMATAN TIGO LURAH	0.000.000,00	5.000.000,00			474.210.000,00	472.570.882,00	953.760.000,00	474.210.000,00	475.570.882,00	953.760.882,00		
4.00.03.14.	KECAMATAN DANAU KEMBAR	5.000.000,00	5.000.000,00			397.050.000,00	390.357.675,00	797.502.675,00	397.050.000,00	396.552.675,00	773.402.675,00	(20.500.000,00) (2.30)	
4.00.04.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					1.172.163.062,00		1.172.163.062,00	1.112.000.000,00		1.412.065.000,00	169.068.062,00 (5.13)	
4.00.04.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.172.163.062,00	1.007.966.303,00	2.000.129.415,00	1.112.000.000,00	8.691.998.303,00	7.804.101.353,00	4.943.901.930,00	72,00
	JUMLAH	1.294.764.400.000,00	1.266.730.229.100,00	2.021.484.666.000,00	0,95	792.561.729.585,00	870.914.810.893,00	1.063.530.525.472,00	780.050.003.012,96	500.030.370.943,00	1.298.581.733.555,96	(364.194.709.522,04) (21,94)	

Kode	Uraian	Pembayaan			SILPA TAB Nello
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembayaan	
1	2	3	4	5	6
3.00.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	34.861.504.775,67	3.000.000.000,00	31.861.504.775,67	-
3.00.03.	KEUANGAN	34.861.504.775,67	3.000.000.000,00	31.861.504.775,67	-
3.00.03.00.	PPKD	34.861.504.775,67	3.000.000.000,00	31.861.504.775,67	-

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

4.00.04.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.04.4.00.04.17.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-
4.00.04.4.00.04.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.616.325,00	128.616.325,00	-	-	-
4.00.04.04.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	132.000.000,00	597.000.000,00	465.000.000,00	352,27	
4.00.04.04.21.03.	KOORDINASI FORUM FORUM DISKUSI POLITIK	-	325.000.000,00	325.000.000,00	-	
4.00.04.4.00.04.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	-	274.000.000,00	274.000.000,00	-	
4.00.04.4.00.04.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	-	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
4.00.04.04.21.08.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI BAGI PARTAI POLITIK	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	
4.00.04.4.00.04.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
4.00.04.4.00.04.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
4.00.04.04.21.09.	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PEMILU BAGI APARATUR, ORKEMAS DAN PARPOL	63.000.000,00	203.000.000,00	140.000.000,00	222,22	
4.00.04.4.00.04.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
4.00.04.4.00.04.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	155.000.000,00	140.000.000,00	933,33	
	JUMLAH BELANJA	2.860.129.415,00	7.804.031.353,00	4.943.901.938,00	172,86	
	SURPLUS(DEFISIT)	(2.860.129.415,00)	(7.804.031.353,00)	(4.943.901.938,00)	172,86	

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah (Dekurang)
		Jenis Defanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah		
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	
4.00.4.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,00	5.000.000,00		65.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00		65.000.000,00		
4.00.4.00.04.01.06.09	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,00	5.000.000,00		65.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00		65.000.000,00		
	JUMLAH	39.201.606.526,00	234.895.966.215,00	214.435.154.519,00	489.102.727.260,00	39.166.350.246,00	264.766.006.756,00	294.988.433.501,00	508.930.870.943,00	19.828.143.683,00	

BUPATI SOLOK



GUSMAL

1	2	3	4	5=4-3	6
08.2.00.02.	PARIMISATA	6.283.348.500,00	7.184.692.391,00	901.342.891,00	14,34
09.	Agama	-	-	-	-
10.	Pendidikan	86.016.041.429,00	88.811.228.998,00	2.795.185.669,00	3,25
10.1.01.01.	PENDIDIKAN	85.069.745.429,00	87.663.072.998,00	2.573.327.569,00	3,02
10.1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	928.296.000,00	1.148.154.000,00	221.858.000,00	23,95
11.	Pertindungan Sosial	6.247.004.100,00	6.701.817.103,00	454.813.003,00	7,28
11.1.01.06.	SOSIAL	2.468.783.400,00	2.791.883.400,00	322.900.000,00	13,08
11.1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	701.100.000,00	693.013.000,00	(8.087.000,00)	(1,15)
11.1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.077.120.700,00	3.217.120.703,00	140.000.003,00	4,55
JUMLAH		489.102.727.250,00	508.930.870.943,00	19.828.143.693,00	4,05

BUPATI SOLOK.



GUSMAL

KABUPATEN SOLOK
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 303

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1					1	2
Golongan IV/c		14	2				6	22
Golongan IV/b		14	29	7		223	22	295
Golongan IV/a		2	87	36		1276	48	1449
JUMLAH GOLONGAN IV		31	118	43		1499	77	1768
Golongan III/d			27	217	4	300	84	632
Golongan III/c			2	151	4	341	106	604
Golongan III/b				31	18	736	189	974
Golongan III/a				6	2	419	213	640
JUMLAH GOLONGAN III			29	405	28	1796	592	2850
Golongan II/d					1	114	77	192
Golongan II/c						75	255	330
Golongan II/b						21	73	94
Golongan II/a						6	238	244
JUMLAH GOLONGAN II					1	216	643	860
Golongan I/d							8	8
Golongan I/c							24	24
Golongan I/b							1	1
Golongan I/a							5	5
JUMLAH GOLONGAN I							38	38
TOTAL	0	31	147	448	29	3511	1350	5516

BUPATI SOLOK,


 GUSMAL

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

KABUPATEN SOLOK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 304

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang s/d Tahun 2017	Perkiraan Penambahan Tahun 2018	Perkiraan Pengurangan Tahun 2018	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2018	
						7(d+5-g)	
1	Piutang Pajak Daerah	3	20.853.608.615,00	1.775.672.230,00	882.650.881,00	21.746.629.964,00	
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(16.609.881.648,34)	(847.021.122,11)	-	(17.456.902.770,45)	
3	Piutang Retribusi Daerah		44.272.800,00	351.850.000,00	902.400,00	395.220.400,00	
4	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		(17.482.720,00)	(49.333.480,00)	-	(66.816.200,00)	
5	Piutang Lainnya		5.235.221.002,33	8.096.261.504,29	1.429.082.371,00	11.902.400.135,52	
6	Penyisihan Piutang Lainnya		(2.437.885.223,35)	(216.536.619,21)	-	(2.654.421.842,56)	
7	Belanja Dibayar Dimuka		175.394.500,00	170.347.906,84	175.394.500,00	170.347.906,84	
JUNLAH			7.243.247.325,64	9.281.240.419,81	2.488.030.152,00	14.036.457.593,45	

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

KABUPATEN SOLOK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 30

Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal (investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Diterbitkan Sampai dengan Anggaran Tahun Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah diterbitkan sampai akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum diterbitkan	Hasil Penyertaan modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterbitkan kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang diterbitkan kembali dengan tahun ini
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2001	BPD (Bank Negeri)			1.562.900.000,00	1.562.900.000,00	-	1.562.900.000,00	-	-	-	1.562.900.000,00
2001				566.073.000,00	566.073.000,00	-	566.073.000,00	-	-	-	566.073.000,00
2003				625.000.000,00	625.000.000,00	-	625.000.000,00	-	-	-	625.000.000,00
2003				250.000.000,00	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
2003				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00
2004				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
2004				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00
2003	Solinda			2.322.235.246,00	2.322.235.246,00	-	2.322.235.246,00	-	-	-	2.322.235.246,00
2003	PDAM			404.177.998,00	404.177.998,00	-	404.177.998,00	-	-	-	404.177.998,00
2006	BPD (Bank Negeri)			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00
2006	BPR			-	-	-	-	-	-	-	-
2008	BPD (Bank Negeri)			1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	-	1.001.000.000,00	-	-	-	1.001.000.000,00
2008	BPD (Bank Negeri)			179.334.566,33	179.334.566,33	-	179.334.566,33	-	-	-	179.334.566,33
2010	Revolving P2KU			230.800.000,00	230.800.000,00	-	230.800.000,00	-	-	-	230.800.000,00
2011	Penyisihan Revolving P2KU			1230.000.000,00	1230.000.000,00	-	1230.000.000,00	-	-	-	1230.000.000,00
2012	BPD (Bank Negeri)			1.769.692.434,00	1.769.692.434,00	-	1.769.692.434,00	-	-	-	1.769.692.434,00
2012	BPD (Bank Negeri)			3.811.000.000,00	3.811.000.000,00	-	3.811.000.000,00	-	-	-	3.811.000.000,00
2013	PDAM			11.119.173.165,41	11.119.173.165,41	-	11.119.173.165,41	-	-	-	11.119.173.165,41
2013	PT. Buluhwang Citrajaya Sumbur			2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	-	2.824.899.000,00	-	-	-	2.824.899.000,00
2013	BPD (Bank Negeri)			6.323.000.000,00	6.323.000.000,00	-	6.323.000.000,00	-	-	-	6.323.000.000,00
2014	BPD (Bank Negeri)			7.369.999.999,67	7.369.999.999,67	-	7.369.999.999,67	-	-	-	7.369.999.999,67
2015	PDAM			10.980.353.952,68	10.980.353.952,68	-	10.980.353.952,68	-	-	-	10.980.353.952,68
2015	UPD (Bank Negeri)			4.539.550.000,00	4.539.550.000,00	-	4.539.550.000,00	-	-	-	4.539.550.000,00
2016	PDAM			4.758.507.170,00	4.758.507.170,00	-	4.758.507.170,00	-	-	-	4.758.507.170,00
2016	UPD (Bank Negeri)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
2017	PDAM			4.137.000.000,00	4.137.000.000,00	-	4.137.000.000,00	-	-	-	4.137.000.000,00
2017	BPD (Bank Negeri)			4.999.450.000,00	4.999.450.000,00	-	4.999.450.000,00	-	-	-	4.999.450.000,00
2018	PDAM			-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
Jumlah				81.543.346.832,09	81.543.346.832,09	1.500.000.000,00	83.043.346.832,09	-	-	-	83.043.346.832,09

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

KABUPATEN SOLOK
DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 306

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun 2017	Perkiraan Penambahan Tahun 2018		Perkiraan Pengurangan Tahun 2018		Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2018
			3	4	5	6 (3+4-5)	
1	Tanah	270.285.561.058,00		9.626.812.013,36	1.064.444.029,00		278.847.929.042,36
2	Peralatan dan Mesin	222.794.312.161,36		43.885.760.467,79	20.842.155.012,79		245.837.917.616,36
3	Gedung dan Bangunan	597.711.661.422,91		49.561.813.966,63	13.053.596.292,79		634.219.879.096,75
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	702.087.163.051,34		98.779.725.333,32	24.563.085.694,00		776.303.802.690,66
5	Aset Tetap Lainnya	277.846.884.689,33		30.587.568.391,97	32.893.932.232,13		275.540.520.849,17
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.482.997.228,00		12.974.387.900,87	11.996.847.400,00		22.460.537.728,87
7	Akumulasi Penyusutan	(799.417.378,261)		(58.831.852.508,22)	(64.521.108.433,66)		(793.728.122.335,79)
Jumlah		1.292.791.201.349,71		186.584.215.565,72	39.892.952.227,05		1.439.482.464.688,38

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

KABUPATEN SOLOK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 307

No	Uraian	Saldo Pada Akhir Tahun 2017	Perkiraan Penambahan TA 2018	Perkiraan Pengurangan TA 2018	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2018
		3	4	5	6 (3+4-5)
	Ases Tidak Berwujud	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	Ases Rusak Berat	71.289.546.244,52	2.799.265.134,00	1.947.758.143,26	72.141.053.235,26
	Tuntutan Ganti Rugi	1.244.260.353,43	-	-	1.244.260.353,43
	Ases Lain-lain (Ases dalam Pencelurusan)	11.990.985.143,85	164.111.915,00	8.805.294.382,96	3.349.802.675,89
	Ases Lainnya - yang akan Diserahkan	7.266.547.744,00	35.472.320.381,92	7.266.547.744,00	35.472.320.381,92
	Ases Lainnya - Dana Siap Pakai	888.726.910,00	6.176.444,00	-	894.903.354,00
	Jumlah	92.680.066.395,80	38.446.873.874,92	18.019.600.270,22	113.107.340.000,50

RUPATI SOLOK,


GUSMAL

KABUPATEN SOLOK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 331

KEPADA YAYASAN
YAYASAN SOLOK,
GUSMAL,